DOKUMEN RANCANGAN AWAL RENJA PD TAHUN ANGGARAN 2025





DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan dan acuan dalam penganggaran Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025. Rancangan Awal Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Tahun 2025 disusun dengan berpedoman terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, perkiraan realisasi 2025 serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026. Selain itu, penyusunan Dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan Permukiman Tahun 2025 juga mengacu pada arah kebijakan Daerah dan juga Aspirasi Masyarakat.

Secara berjenjang Rancangan Awal Renja PD ini juga kemudian harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Program dan Kegiatan masing masing Bidang dan Bagian. Dengan adanya sinkronisasi antar unit di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tersebut, maka keseluruhan dokumen perencanaan akan dapat dipergunakan dalam penyusunan RKA-OPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Tahun 2025.

Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, kami berharap agar seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ini dapat diimplementasikan untuk mensukseskan program Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan, membuka kesempatan kerja lebih luas lagi, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.

Tarempa, 02 Feburuari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PEMUKIMAN,

SYARIF AHMAD, SE

19770720 201001 1 016

DAFTAR ISI

BA	B I PENDAHULUAN	. 4
	1.1. Latar Belakang	.4
	1.2 Landasan Hukum	5
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BA	B II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN LALU	8
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD	.8
	2.2 Analisis Kerja Pelayanan OPD	.17
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD	19
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
	2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	. 25
BA	B III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	. 27
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi	. 27
	3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja OPD	37
	3.3 Program Dan Kegiatan	40
BA	B IV PENUTUP	46
	4.1Kesimpulan	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan pedoman tahapan dan tata cara penyusunan Renja PD tertuang pada Peraturan Pemerintah No. Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rancangan Awal Renja PD merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang pada dasarnya dapat mempermudah setiap OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahun pada Renstra perlu pengawalan yang terstuktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi pada masing-masing OPD. Dinamika yang terjadi ini dapat dipengaruh oleh faktor-faktor internal maupun eksternal seputar isu-isu sektoral OPD atau perkembangan wilayah. Perkembangan ataupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan dapat senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Awal Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Selain itu untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, Rancangan Awal Renja PD memuat juga masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Awal Renja PD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif beserta prakiraan maju. Pagu indikatif sangat terkait dengan proses penyusunan APBD sehingga tercapai keselarasan pembangunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Renja PD ini adalah sebagai berikut: adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- 4. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Awal ini adalah sebagai berikut:

- 1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Awal Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Memuat mengenai latar belakang penyusunan Rancangan Awal Renja PD, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renja, maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Renja, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas, menyatakan hasil sebagai berikut:

Terdapat realisasi 39 Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, meliputi:

Tabel. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Kabupaten : Kepulauan Anambas

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

NO		KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	Persentase (%)
1		2	3	7	8
I	Per	gram Penunjang Urusan nerintahan Daerah pupaten/Kota	19.338.152.844	15.535.500.746	80,34
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000,00	-	-
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.000.000,00	-	-
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.373.296.463,00	8.695.716.718	83,83
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	9.415.636.463,00	7.738.056.718	82,18
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	957.660.000,00	957.660.000	100,00
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.870.911.279,00	3.515.966.958	72,18
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.761.097.713,00	1.561.979.961	88,69
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SPAM	1.799.035.148,00	964.571.933	53,62
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.204.538.418,00	966.118.064	80,21
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SPAM	106.240.000,00	23.297.000	21,93
	4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3.452.232.872,00	3.088.690.622	89,47
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.452.232.872,00	3.088.690.622	89,47
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596.712.230,00	235.126.448	39,40
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	199.999.480,00	-	-

V	Pen	gembangan Sistem Air bah	374.800.000	295.072.000	78,73
	Pro	3R/TPS gram Pengelolaan dan	1 2 = 1,10		,
		- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-	707.120.514,00	81.540.390	11,53
	8	Pengelolaan Persampahan Regional di Daerah Kabupaten/Kota	707.120.514,00	81.540.390	11,53
	1 0.1	Pengembangan Sistem dan			
IV	Sist	gram Pengembangan em dan Pengelolaan sampahan Regional	707.120.514	81.540.390	11,53
	Dro	Teknis SPAM gram Pengembangan	2.500.777.755,00	2.333.003.000	70,00
		- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan	2.988.777.495,00	2.333.689.660	78,08
		di Daerah Kabupaten/Kota			
	7	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.988.777.495,00	2.333.689.660	78,08
		yediaan Air Minum			
III		gram Pengelolaan dan gembangan Sistem	2.988.777.495	2.333.689.660	78,08
		- Normalisasi/Restorasi Sungai	4.019.725.113,00	3.942.071.720	98,07
		 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 	263.900.000,00	39.682.500	15,04
		- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	974.848.159,00	638.718.946	65,52
		- Pembangunan Tanggul Sungai	1.214.774.587,00	744.660.908	61,30
		- Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	-	-	-
		- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Baku	901.310.800,00	814.229.888	90,34
	6	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.374.558.659,00	6.179.363.962	83,79
II		gram Pengelolaan Sumber a Air (SDA)	7.374.558.659	6.179.363.962	83,79
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	396.712.750,00	235.126.448	59,27
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

		Pengelolaan dan			
	9	Pengembangan Sistem Air	374.800.000,00	295.072.000	78,73
		Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	374.800.000,00	295.072.000	78,73
	Pro	gram Pengelolaan dan			
VI	Pen	gembangan Sistem	1.224.057.491	1.012.328.468	82,70
	Dra	inase			
	10	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.224.057.491,00	1.012.328.468	82,70
		- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	559.991.658,00	460.355.250	82,21
		- Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	664.065.833,00	551.973.218	83,12
VII		gram Pengembangan mukiman	1.345.665.637	1.341.991.408	99,73
		Penyelenggaraan Infrastruktur			
	12	pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.345.665.637,00	1.341.991.408	99,73
		- Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.345.665.637,00	1.341.991.408	99,73
VIII		gram Penataan Bangunan lung	37.353.236.988	27.662.888.532	74,06
	13	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	37.353.236.988,00	27.662.888.532	74,06
		- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	200.837.000,00	117.440.000	58,48
		- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	37.152.399.988,00	27.545.448.532	74,14
		gram Penyelenggaraan			

	14	Penyelenggaraan Jalan	02 265 019 674 00	60 967 525 409	75 70
	14	Kabupaten/Kota	92.265.918.674,00	69.867.525.498	75,72
		Pembangunan Jalan	36.968.150.567,00	26.563.317.882	71,85
		- Rekonstruksi Jalan	41.807.422.400,00	35.825.549.329	85,69
		- Rehabilitasi Jalan	11.868.491.002,00	5.907.279.447	49,77
		Pembangunan Jembatan	1.621.854.705,00	1.571.378.840	96,89
х		gram Penataan Bangunan Lingkungannya	357.478.200	-	-
	15	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	357.478.200,00	-	-
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	357.478.200,00	-	-
ΧI		gram Penyelenggaraan Jasa struksi	149.998.000	-	-
	16	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	149.998.000,00	-	-
		- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	149.998.000,00	-	-
XII		gram Penyelenggaraan ataan Ruang	2.840.000.000	280.889.532	9,89
	17	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100.000.000,00	24.247.831	24,25
		- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	100.000.000,00	24.247.831	24,25
	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.390.000.000,00	165.860.101	6,94
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	150.000.000,00	27.204.812	18,14
		 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 	2.240.000.000,00	138.655.289	6,19
	19	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000,00	51.351.600	24,45
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	210.000.000,00	51.351.600	24,45

	20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000,00	39.430.000	28,16
		- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	140.000.000,00	39.430.000	28,16
XIII		gram Pengembangan umahan	1.723.082.460	1.581.257.460	91,77
	21	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.723.082.460,00	1.581.257.460	91,77
		- Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.723.082.460,00	1.581.257.460	91,77
XIV	Pro	gram Kawasan Permukiman	1.850.000.000	96.685.433	5,23
	22	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	400.000.000,00	55.440.033	13,86
		- Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	150.000.000,00	4.200.000	2,80
		- Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	250.000.000,00	51.240.033	20,50
	23	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1.450.000.000,00	41.245.400	2,84
		- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.450.000.000,00	41.245.400	2,84
χv		gram Peningkatan Sarana, sarana, dan Utilitas Umum U)	34.589.170.674	14.768.599.550	42,70
	24	Úrusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	34.589.170.674,00	14.768.599.550	42,70
		- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	34.589.170.674,00	14.768.599.550	42,70
XVI	Pro Lok	gram Pengelolaan Izin asi	200.000.000	134.908.326	67,45
	25	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	134.908.326	67,45
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	200.000.000,00	134.908.326	67,45

XVII	Pro	gram Penatagunaan Tanah	100.000.000	3.500.000	3,50
	26	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	3.500.000	3,50
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100.000.000,00	3.500.000	3,50
		JUMLAH	204.782.017.636	141.374.609.106	80,34

2.2. Analisis Kerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas

Hasil kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas ditunjukkan pada tabel berikut:

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Berdasarkan evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra OPD dan kondisi eksisting, maka isu-isu yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 meliputi:

- 1. Perbaikan konektivitas wilayah
- 2. Penyediaan Air minum atau Air Bersih
- 3. Pembangunan Gedung Prasarana Pemerintah Daerah
- 4. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan RKPD ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan tahun 2022, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan sasaran-sasaran dan target-target kinerja program di RPJM, maka ditetapkanlah prioritas pembangunan tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Daftar Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Prioritas	Program	Kinerja		Urusan
NO	Pembangunan	Program	Indikator	Target	Urusan
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas	Jumlah orang yang melalui pelabuhan (naik dan turun)	NA	
		Perhubungan	Jumlah bandara perintis Jumlah orang yang	1	-
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	melalui pelabuhan (naik dan turun)	NA	Perhubungan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah bandara perintis Jumlah orang yang melalui pelabuhan (naik dan turru)	NA	
		Kerjasama Pembangunan	Jumlah bandara perintis Pengelolaan perbatasan antar kabupaten	NA	Perencanaan
1	Peningkatan aksesibilitas wilayah	Pengembangan Wilayah Perbatasan	Infrastruktur perbatasan negara dan kabupaten	NA	Pembangunan
		Penataan Daerah Otonomi Baru	Pengelolaan perbatasan antar kabupaten	NA	
		Program Pengembangan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terdepan	Jumlah pulau terdepan berpenghuni yang meningkat aksesibilitasnya	NA	Pemerintahan Umum
		Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Coverage area telekomunikasi seluler (%)	100%	
			Akses masyarakat perdesaan terhadap komunikasi, informasi, dan media massa	NA	Komunikasi da Informatika
			Warnet di setiap kecamatan	Ada	-
		Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata	RSUD Tipe C	1	
2	Peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata	RSUD Tipe C	1	Kesehatan
		Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	Jumlah Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan	14	
		Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Pustu menjadi Puskesmas	22	
		Pengadaan dan Pembangunan Sekolah Luar Biasa	Jumlah Sekolah Luar Biasa	1	
		Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,50	
3	Pemerataan akses terhadap layanan pendidikan	Pendidikan Menengah	Rasio ketersediaan sekolah menengah terhadap penduduk usia sekolah menengah (2008)	90,69	Pendidikan
		Manajemen Pelayanan Pendidikan	Adanya inisiasi menuju berdirinya perguruan	Ada	

NT.	Prioritas	n	Kinerja		T I
No	Pembangunan	Program	Indikator	Target	Urusan
			tinggi di kabupaten Kepulauan Anambas		
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Penduduk berakses air minum (jiwa)	25.649	Pekerjaan Umum
		Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	NA	
		Pengembangan Media Partisipasi Masyarakat	Media komunikasi yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan	2	Pemerintahan Umum
4	Peningkatan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik paling kurang berkategori "baik" dengan nilai indeks > 3,00	>3,00	
			Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai	NA	Seluruh Urusan
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Nilai efektivitas dan efisiensi kerja dari hasil analisis beban kerja paling kurang 0,70	≥0,70	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan sumber daya aparatur	NA	
		Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	80	Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pengembangan Pemasaran	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara	NA	
	Pengembangan	Pariwisata	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	NA	Pariwisata
5	pariwisata bahari	Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah destinasi Pariwisata	NA	
		Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Jumlah destinasi wisata bahari	NA	Lingkungan Hidup
		Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama investasi PMA dan PMDN	NA	Penanaman Modal
	Peningkatan	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN	NA	
6	investasi dan pemasaran produk bidang pertanian	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Volume perdagangan produk pertanian/perkebunan	NA	Pertanian
	tanaman, kelautan, dan perikanan	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Volume perdagangan produk peternakan	NA	
	dan perikanah		Nilai produksi perikanan budidaya (kg) 2009	420 ribu	
		Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah pembudidaya ikan (orang) Produktivitas perikanan	1700	Kelautan dan Perikanan
			budidaya		

No	Prioritas	Dungmann	Kinerja		Urusan
110	Pembangunan	Program	Indikator	Target	Urusan
			Nilai produksi perikanan tangkap (kg) 2009	7,3 juta	
		Pengembangan Perikanan	Armada tangkap	NA	
		Tangkap	Produktivitas perikanan tangkap (cost per unit ratio)	NA	
		Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai perdagangan produksi perikanan	NA	
		Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Luas kawasan budidaya	NA	
		Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan	Jumlah industri pengolahan perikanan	NA	

Dari tabel di atas, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Anambas berkorelasi terhadap prioritas pembangunan no. 4 Peningkatan Pelayanan Publik oleh Aparatur Pemerintah dengan program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur. Selain itu, terdapat temuan-temuan yang menunjukkan perbedaan terhadap rancangan RKPD. Temuan-temuan tersebut antara lain meliputi:

1. Bidang Cipta Karya meliputi:

- 1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/KotaPendampingan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
- 1.2 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- 1.3 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1.4 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- 1.5 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

2. Bidang Bina Marga meliputi:

- 2.1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- 2.2. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

3. Bidang Sumber Daya Air meliputi:

- 3.1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3.2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3.3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. Bidang Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang meliputi :

- 4.1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- 4.2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 4.3. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
- 4.4. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- 4.5. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- 4.6. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 4.7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 4.8. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 4.9. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- 5.1. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 5.2. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 5.3. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 5.4. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 5.5. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 5.6. Penerbitan Izin Membuka Tanah
- 5.7. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

5. Bidang Perumahan dan permukiman

- 5.1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 5.2. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 5.3. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 5.4. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 5.5. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- 5.6. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
- 5.7. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
- 5.8. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
- 5.9. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

6. Bidang sekretariat meliputi:

- 6.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 6.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 6.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 6.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. UPTD SPAM SIANTAN

- 7.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 7.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tabel 2.4

METRIKS KEGIATAN 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

		GRAM/KEGIATAN	2025
1.03.01 PROGF	RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	N DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran		
		2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	156.000.
	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Pera	9	
		2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.021.293.
		2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1.187.649.
	SKPD	De see allest De coels	
	1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian F	205.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangl		
		2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	855.243.
		2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.504.378.
	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang		1.304.376.
	, , , ,	2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	<u> </u>	2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.165.709.
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,1253,763,
	ř	2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	
		an Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.801.
	1.03.01.	2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	400,000
	atau Ba	ngunan Lainnya	400.000.
L.03.02 PROGF	RAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SD	A)	
		nan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabu	
		2.01.02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup	400.000
	untuk K	Onstruksi Air Tanah dan Air Baku	
	1.03.02.	.2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	33.000.000
	1.03.02	.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai	1.014.774
	1.03.02	2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2.974.848.
	1.03.02	.2.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	22.112.461
		.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	1.419.725
		olaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya d	
		.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
	1.03.02.	2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	250.000.
1.03.03 PROGF	RAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	I SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengemba	ngan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
	1.03.03.	2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	20.000.000
	1.03.03.	2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
		.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	
		2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	
		2.01.25 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	2.500.000
		liaan Air Minum (SPAM)	
		.2.01.26 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	2.000.000
1 02 04 DDOC	Perpipa RAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGE		
1.03.04 PROGE		Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
		2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem	
		plaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan	
	_	ten/Kota	
	-	2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.510.520
L.03.05 PROGE	RAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN		
		ngan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	1.499.200.
		at Skala Permukiman	1.433.200
		2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		at Skala Permukiman	
1.03.06 PROGF	RAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN		
	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengemba	ngan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daera	
	1.03.06.	2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
		2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	814.065.

Bingurian Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah koluputen/kota		1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruk	tur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
1.00.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUKO 1.00 Silv. 201 Penyelenggaran Banganan Gedung di Wilayah Derah Kabupaten/Kota, Pemberian Irin Mendinkan Bel 1.00 Silv. 201 CP Penyelenggaran Pemerbana Irin Mendinkan Bangunan (108), Sentilaksi di Kringgi (147), pera Penenga Amarikan Irin Mendinkan Bangunan (108), Sentilaksi di Kringgi (147), pera Penenga Amarikan Irin Mendinkan Bangunan (108), Sentilaksi di Kringgi (147), pera Penenga Amarikan Irin Mendinkan Bangunan (108), Sentilaksi di Kringgi (147), pera Penenga Amarikan Iringgi (147), pera Penenga Amarikan Penenda Iringgi (147), pera Penenga Amarikan Pelestarian dan Pembengkaran Bangunan Gedung (147), pera Penenga Amarikan Iringgi (147), pera Penenga Penenga Penenda Pera Penenga Penenda Iringgi (147), pera Penenga Iringgi (147), pe		1.03.07	.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan	1 //73 93
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bengunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Lis Mendirikan Bagunan (Mel). Sertifikat Laik Fungsi (SEI), prem Tengap Ahli Bangman Gedung (TABG), Sertifikat Laik Fungsi (SEI), prem Tengap Ahli Bangman Gedung (TABG), Sertifikat Laik Fungsi (SEI), prem Tengap Ahli Bangman Gedung (TABG), Sendiratan Bangman Gedung Laim Independental SMBG 1.03.08.2.01.02 Personanan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfastan Bangman Gedung Laim (Mepending) Pengapatan (Mepending) Pengawasan, dan Pemanfastan Bangman Gedung Laim (Mepending) Pengapatan Pendapatan Bangman Gedung (PAG). 1.03.08.2.01.032 Penyelenggaraan Perelotian Personan Gedung (PAG), Sertifikat Laik Fungsi (SEI), Surat Bukit Kepernilikan Bangman Gedung (PAG), Sertifikat Laik Fungsi (SEI), Surat Bukit Kepernilikan Bangman Gedung (PAG), Sertifikat Laik Fungsi (SEI), Surat Bukit Kepernilikan Bangman Gedung (PAG), Sertifikat Laik Fungsi (SEI), Surat Bukit Kepernilikan Bangman Gedung (PAG), Sertifikat Laik Fungsi (SEI), Surat Bukit Kepernilikan Bangman Gedung (PAG), Sertifikat Laik Fungsi (SEI), Surat Bukit Kepernilikan Bangman Gedung (PAG), Sertifikat Laik Fungsi (SEI), Surat Bukit Kepernilikan Bangman Gedung (PAG), Sertifikat Laik Fungsi (SEI), Surat Bukit Kepernilikan Bangman Gedung (PAG), Sertifikat Laik Fungsi (SEI), Surat Bukit Kepernilikan Bangman Gedung (PAG), Sertifikat Laik Fungsi (SEI), Surat Bukit Kepernilikan Bangman Gedung (PAG), Sertifikat Laik Fungsi (SEI), Surat Bukit Kepernilikan Bangman Gedung (PAG), Sertifikat Laik Kepernilikan Bangman Gedung (PAG), Sertifikat Laik Kepernilikan Bangman Gedung (PAG), Sertifikat Laik Kepernilikan Bangman Berlaik Laik Kepernilikan Bangman Berlaik Laik Kepernilikan Bangman Berlaik Laik Bangman Berlaik Laik Bangman Berlaik Laik Bangman Berlaik Laik Bangman Berlaik			kiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.473.32
1.03.02.20 UN Pervyelenggaraan Penerbitan inin Mendinikan Bangunan (MM), Sertifikat Lak Eurgis (SEI), pener Imenga Ahil Bangunan Gedung (RAG), Pendatana Rangunan Gedung, serta Implementasi SIMBS 1.03.08.20 UD Perencanana, Penerhanganan, Pengawasan, dan Penanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 1.03.08.20 UD Permbangunan, Penanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung Burari Kabupaten/Kota 1.03.08.20 UD Sembangunan, Penanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung umuk Keperinggar arrangsi Berarih kabupaten/Kota 1.03.08.20 UD Sembangunan Penerbitan Penerbujuan Bangunan Gedung (SISKIG), Bencana Teknis Permbongkaran Bangunan Gedung (GRB), Semitika Laik Eurgis (ISK), sura Bidak Kepemilian Bangunan Gedung (SISKIG), Bencana Teknis Permbongkaran Bangunan Gedung (RRB), Im Profes Ahil (TRA), Tim Penal Teknis (TR), Penlik, dan Pendatan Bangunan Gedung Grapaten (Pendang) (SISKIG), Bencana Teknis Permbongkaran Bangunan Gedung (RRB), Tim Profes Ahil (TRA), Tim Penlal Teknis (TR), Penlik, dan Pendatan Bangunan Gedung Grapaten (Pendang) (SISKIG), Bencana Teknis Permbongkaran Bangunan Gedung (RRB), Tim Profes Ahil (TRA), Tim Penlal Teknis (TR), Penlik, dan Pendatan Bangunan Gedung (RRB), Tim Profes Ahil (TRA), Tim Penlal Teknis (TR), Penlik, dan Pendatan Bangunan Gedung (RRB), Tim Profes Ahil (TRA), Tim Penlal Teknis (TR), Penlik, dan Pendatan Bangunan Gedung (RRB), Tim Profes Ahil (TRA), Tim Penlal Teknis (TR), Penlik, dan Pendatan Bangunan Gedung (RRB), Tim Profes Ahil (TRA), Tim Penlal Teknis (TR), Penlik, dan Pendatan Bangunan Gedung (RRB), Tim Profes Ahil (TRA), Tim Penlal Teknis (TR), Penlik, dan Pendatan Bangunan Gedung (RRB), Tim Profes Ahil (TRA), Tim Penlal Teknis (TRA), Penla	1.03.08 PROG			
Sentifiat talk Fungis (SFI), peran Fenaga Ahil Bangunan Gedung (TABG), Pendatanan Bangunan Gedung (Tablo), Pengwasan, dan Penanfastan Bangunan Gedung (Tabunan, Penanfastan), Penanfastan Bangunan Gedung (Dearth Kubupaten/Kota) 1.03.08.2.01.003 Penyunganan, Penanfastan, Peledirahan dan Penanfastan Bangunan Gedung untuk Kepentiliapa Srotregis Duerah Kabupaten/Kota 1.03.08.2.01.0032 Penyulenggaranan Penerbitan Percentujuan Bangunan Gedung (PBG), Sentifiat talk Fungis (SFI), Surra Bukat Kepermilian Bangunan Gedung (PBG), Sentifiat talk Fungis (SFI), Surra Bukat Kepermilian Bangunan Gedung (PBG), Sentifiat talk Fungis (SFI), Surra Bukat Kepermilian Bangunan Gedung (PBG), Sentifiat talk Fungis (SFI), Surra Bukat Kepermilian Bangunan Gedung (PBG), Sentifiat talk Fungis (SFI), Surra Bukat Kepermilian Bangunan Gedung (PBG), Sentifiat talk Fungis (SFI), Surra Bukat Kepermilian Bangunan Gedung (SBKB), Bernal Bernal Bernal Bangunan Bangunan Bangunan Bernal Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Banguna				
Pendidatan Banguran Gedung, serta Implementasi SMBS			1 - 1	
1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pengawasan, dan Pembangkaran Bangunan Gedung Dearris Kabupatera/Kota 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat taik Kungsi (SIF), Suria Biskit Kepemilikan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat taik Kungsi (SIF), Suria Biskit Kepemilikan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat taik Kungsi (SIF), Suria Biskit Kepemilikan Bangunan Gedung (RBG), Sertifikat taik Kungsi (SIF), Suria Biskit Kepemilikan Bangunan Gedung (RBG), Sertifikat taik Kungsi (SIF), Suria Biskit Kepemilikan Bangunan Gedung (RBG), Sertifikat taik Kungsi (SIF), Suria Biskit Kepemilikan Bangunan Gedung (RBG), Renana Teknia Pembahan Bangunan Gedung (RBG), Renana Teknia Sita (RBG), Sertifikat dan Pembahan Bangunan Gedung Mangunan Gedung Mangu				
Sangunan Gedung Derenk Kabupaten/Kota 139,040.00 130,022 Pembangunan, Pelestariaan dan Pembongkaran bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Derah Kabupaten/Kota 138,040.00 138,82.01.0023 Pembengaran Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (SSRG), Renoan Terith Carlo Perman Bangunan Gedung (SSRG), Renoan Terith Erenbongkaran Bangunan Gedung (SSRG), Renoan Terith Pembongkaran Bangunan Gedung (SSRG), Renoan Terith Pembongkaran Bangunan Gedung (SSRG), Renoan Terith Pembongkaran Bangunan Gedung melalui SIMBG 130,002.01 Pemplan State (PP), Pemilik, dan Pendatan Bangunan Gedung melalui SIMBG 130,002.01 Pemplan State (PP), Pemilik, dan Pendatan Bangunan Gedung melalui SIMBG 130,002.01 Pemplanggaran Adan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 130,002.01 Pemplanggaran Bangunan dan Lingkungan (Kabupaten/Kota 130,002.01 Pemplanggaran Bangunan dan Lingkungan (Kabupaten/Kota 130,002.01 Pemplanggaran Bangunan dan Lingkungan 140,000.00 130,000.00				
1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemarfastan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung uruk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1.03.8.12.0023 Pemyelenggaraan Penerbitan Bersetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat talik Yungi (SLR), Sura Bukit Kepenilikan Bangunan Gedung (BSBG), Sertifikat talik Yungi (SLR), Sura Bukit Kepenilikan Bangunan Gedung (RB, Tim Perisa Ahli (TPA), Tim Penilal Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalu (SMBG) 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNAANNYA 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNAANNYA 1.03.09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNAANNYA 1.03.09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan (BAbupaten/Kota) 1.03.10 2.01 Penyelenggaraan Islan Kebupaten/Kota 1.03.10 2.01 Penbangunan dan Lingkungan 1.03.10 2.01 Penbangunan Bernarian Penataan 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03				
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Dearth Kabupaten/Kota 1.03.08.2.01.00.23 Penyalenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (1980, Sertifikat taik Fungs (SJS), Surat Bukit Kepentilikan Bangunan Gedung (1980, Sertifikat taik Fungs (SJS), Surat Bukit Kepentilikan Bangunan Gedung (1980, Sertifikat taik Fungs (SJS), Penils, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui (17PA, Tim Penilal Tehis (1PT), Penils, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui (1980, SIMBG) 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.03.09 Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.09 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 1.03.09 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 1.03.09 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 1.03.00 Penerbenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.00 Penerbenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.10.20 Penerbenggaraan Jalan Salan Salan 1.03.10.20 Penerbenggaraan Jalan 1.03.10.20 Penerbenggaraan Jalan Penerbenggaraan Jalan Penerbenggaraan Jalan Penerbenggaraan Pelathan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.20 P		Daliguii	an dedung baeran kabupaten/kota	
PISGI, Sertifikat Liki Fungsi (SER, Jun 2018 butti Kengen likina Bangunan Gedung (REI), Im Porteis Jahl (TPA), Tim Pental sahl (TPA), T				139.040.00
(PBG), Sertifikat Liki Fungsi (SER), sura bekti Kepemilikan Bangunan Gedung (RSI), im Porteis Jahl (PRA), Tim Portial Jahl (Pr		1.03.08	.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung	
SBRSG), Rencran zelvinis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Protesi Ahli (TPA), Tim Penlial Technis (TPT), Penliik, dan Pendataan Bangunan Gedung melaluis (SIMBG)				
IPAJ, Tim Penlai Teknis (TPT), Penlilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				200.83
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah KabupateryKota 1.03.09.2.01.01 Penyeluang Penataan Bangunan dan Lingkungan (KabupateryKota 1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan (KabupateryKota 1.03.00.2.01 Penyelenggaraan Jalan KabupateryKota 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan KabupateryKota 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan KabupateryKota 1.03.10.2.01 Ola Penyelenggaraan Jalan KabupateryKota 1.03.10.2.01.033 Rekonstruksi Jalan 1.03.10.2.01 1.03 Rekonstruksi Jalan 1.03.10.2.01.033 Rekonstruksi Jalan 1.03.10.2.01.034 Rehabilitasi Jalan 1.03.10.2.01.034 Rehabilitasi Jalan 1.03.10.2.01.12 Penmangunan Jembatan 1.03.10.2.01.12 Pengelenggaraan dan Tertib Penyelenggaraan Jembatan 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Jembatan 1.03.11.2.04 Penyelenggaraan Jembatan Tenga Jerampil Konstruksi 1.03.11.2.04 Penyelenggaraan Pelathan Tenga Jerampil Konstruksi 1.03.11.2.04 Penyelenggaraan Pelathan Tenga Jerampil Konstruksi 1.03.11.2.04 Penyelenggaraan Pelathan Tenga Jerampil Konstruksi 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Jesas Konstruksi 1.03.11.2.04 Penyelenggaraan Pelathan Tenga Permangunan Jerampil Konstruksi 1.03.11.2.04 Penyelenggaraan Pelathan Tenga Permangunan Herib Demanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Penyelenggaraan Pelathan Tenga Permangunan Permangunan Penaturan di Deerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan Julk KabupateryKota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Julk KabupateryKota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Julk KabupateryKota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelengga				
1.03.02.20.10 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 1.05.00.20.10 Sentaan Bangunan dan Lingkungan 16.000.00 1.05.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALM 1.05.10.20.10 Penyelenggaraan Jalan	1.03.09 PRO	OGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN	I LINGKUNGANNYA	
1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebipakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 1.05.00.2.01.03.10.00.2.01.03.10.00.2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.				
Penatana Bangunan dan Lingkungan 16.000.00		, ,,		
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.10.2.01.038 Pembangunan Jalan 1.03.10.2.01.038 Pembangunan Jalan 1.03.10.2.01.038 Pembangunan Jalan 1.03.10.2.01.038 Penbangunan Jalan 1.03.10.2.01.03 Penbangunan Jalan 1.03.10.2.01.03 Penbangunan Jalan 1.03.10.2.01.03 Penbangunan Jalan 1.03.10.2.01.03 Penbangunan Jembatan 7.000.00 1.03.10.2.01.13 Penbangunan Jembatan 7.000.00 1.03.10.2.01.13 Penbangulangan Bencana/Tanggap Darurat 1.03.10.2.01.12 Penbangulangan Bencana/Tanggap Darurat 1.03.10.2.01.12 Penangulangan Bencana/Tanggap Darurat 1.03.10.2.01.12 Penangulangan Bencana/Tanggap Darurat 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan 1.03.11.2.01.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan 1.03.12.04.00 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan 1.0				
1.03.10.PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.03.10.2.01.033 Pembangunan Jalan (1.03.10.2.01.033 Pembangunan Jalan (1.03.10.2.01.033 Pembangunan Jalan (1.03.10.2.01.038 Rekonstruksi Jalan (1.03.10.2.01.038 Rekonstruksi Jalan (1.03.10.2.01.038 Rekonstruksi Jalan (1.03.10.2.01.038 Rehabilitasi Jalan (1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan Jasa Konstruksi (1.03.11.2.0.1.12 Penyelenggaraan (1.03.11.2.0.1.12 Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (1.03.11.2.0.1.12 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (1.03.11.2.0.1.12 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (1.03.11.2.0.1.12 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (1.03.11.2.0.1.12 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (1.03.11.2.0.1.12 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (1.03.11.2.0.1.12 Penyelenggaraan (1.03.11.2.0.1.12 Penyelenggaraan (1.03.11.2.0.1.12 Penyelenggaraan (1.03.11.2.0.1.12 Penyelenggaraan (1.03.11.2.0.1.12 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi (1.03.11.2.0.1.12 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi (1.03.11.2.0.1.12 Pengelongaraan (1.03.11.2.0				16.000.00
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.03.10.2.01.0038 Pembangunan Jalan 1.03.10.2.01.0038 Pembangunan Jalan 1.03.10.2.01.0038 Pembangunan Jalan 1.03.10.2.01.0038 Pembangunan Jembatan 1.03.10.2.01.128 Penahagunan Jembatan 1.03.10.2.01.128 Penahagunan Jembatan 1.03.10.2.01.128 Penahagulangan Bencana/Tanggap Darurat 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Masional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Masional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.11.2.04 Denyeusunan Seprengaran Jasa Konstruksi Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.11.2.04 Denyeusunan Seprengaran Ana Tertib Denyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.11.2.04 Denyeusunan Seprengaran Ana Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.11.2.04 Denyeusunan Seprengaran Ana Ratang Beratan Beratang Rata Ruang Beratak Bupaten/Kota 1.03.12.00 Koordinasi dan Sink	1.03.10 PROG		3 3 3	
1.03.10.2.01.032 Pembangunan Jalan 1.03.10.2.01.0038 Rekonstruksi Jalan 1.03.10.2.01.001.004 Reholbilitäsi Jalan 1.03.10.2.01.01.004 Reholbilitäsi Jalan 1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 1.03.10.2.01.12 Pempangulangan Bencana/Tanggap Darurat 1.03.10.2.01.12 Pengangulangan Bencana/Tanggap Darurat 1.03.11.2.01.12 Pengangunan Pelangunan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.01.12 Pengangunan Pelangunan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.01.12 Pengangunan Pelangunan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.01.12 Pengelenggaraan Pelangunan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.01 Pengelenggaraan Pelangunan Pelangunan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.01 Pengelenggaraan Pelangunan Pelanguna			upaten/Kota	
1.03.10.2.01.033 Rekonstruksi Jalan 1.03.10.2.0112 Mehabilitasi Jalan 1.03.10.2.0112 Penanganan Jembatan 7.000.00 1.03.10.2.01.2 Penangausan Bencana/Tanggap Darurat 1.03.10.2.01.2 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 1.03.10.2.01.2 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 1.03.10.2.01.2 Rekonstruksi Jalan Strategis Desa 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Demishingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Cakupan Derasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Kon Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.03 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Juli Khasional (Kon Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Juli Khasional (Kon Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Juli Khasional (Kon Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Demanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Demanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Usaha, Tertib Demanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Deman Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.0		, ,,		82.800.00
1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan 14.864.59 1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 7.000.00 1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 7.000.00 1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 7.000.00 1.03.10.2.01.12 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 1.03.10.2.01.25 Rekonstruksi Jalan Strategis Desa 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Pempelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Pempelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.01.09 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01.09 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01.09 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.00.09 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupateri/Kota 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupateri/Kota 1.03.11.2.03 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 1.03.11.2.03.09 Penyelenggaraan IlluK Nasional di Kabupateri/Kota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan IlluK Nasional di Kabupateri/Kota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan IlluK Nasional di Kabupateri/Kota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Denetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Baerah Kabupaten/				32.000.00
1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 7.000.00 1.03.10.2.01.13 Rehabilitasi Jembatan 1.03.10.2.01.25 Rekonstruksi Jembatan 1.03.10.2.01.25 Rekonstruksi Jalan Strategis Desa 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengelanggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Dearah Kabupateri/Kota 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Dearah Kabupateri/Kota 1.03.11.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Dearah Kabupateri/Kota 1.03.11.2.03 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 1.03.11.2.03 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Ituk Nasional di Kubupateri/Kota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Ituk Nasional di Kubupateri/Kota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Pengelanggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.09 Pengusunan SoP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.00 Pengusunan SoP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.00 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.00 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.00 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Ko				1/ 96/ 50
1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan 1.03.10.2.01.25 Perenanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 1.03.10.2.01.25 Rekonstruksi Jalan Strategis Desa 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Penmanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Penmanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan UIK Nasional di Kabupaten/Kota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Demanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Demanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Demanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Demanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Demanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Penyelenggaraan, dan Tertib Demanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Dementapan Rencana				
1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 1.03.10.2.01.25 Rekonstruksi Jalan Strategis Desa 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Penmanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Denyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Terkis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Terkis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Terkis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Terkis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.0.02 Bimbingan Terkis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.0.02 Bimbingan Terkis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Penanfaatan Penanfaatan Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				7.000.00
1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 (2.8 limbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 (2.8 limbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi Nasional Kabupaten/Kota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Rama Rama Rama Rama Pengama Rama Rama Rama Pengama Rama Rama Pengama Rama Rama Pengama Penatan Rama Penatana P				
1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampii Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampii Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampii Konstruksi 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Dengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Dengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Dengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Dengawasan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Dengawasan dan Evalusai Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evalusai Tertib Usaha Jasa Konstruksi 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				
1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 1.03.11.2.00.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.12.2.01 Penetapan Riraw Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.10.	.2.01.25 Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	
1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 1.03.11.2.00.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.12.2.01 Penetapan Riraw Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				
dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 10.0.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Noonal (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Tertib Usaha, Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Tertib Usaha, Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Tertib Usaha, Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyeusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyeusunan RRTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyausunan RRTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyausunan RRTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengarah Rabupate				
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.03 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.03 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.03 Penyasunan SoP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerenanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyasunan RRTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				150.00
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01.01 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.02.01 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IJJK Nasional di Kabupaten/Kota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbiangan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbiangan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.12.2.0107 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penercanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Coordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Okordinasi dan Sinkronisasi Pengam Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03 Okordinasi dan Sinkronisasi Pengam Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengam Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengam Pemanfaatan Ruang				150.00
1.03.11.2.01.01 Penylapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampii Konstruksi 1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampii Konstruksi 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.03 In Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 1.03.12.2.0.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 1.03.12.2.01.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Penyusunan Peranfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.11 PRO	OGRAM PENGEMBANGAN JASA KONS	STRUKSI	
Terampil Konstruksi 1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Demanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.01 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatiha	an Tenaga Terampil Konstruksi	
1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.04 Penyelenggaraan IUlK Nasional di Kabupaten/Kota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.09 Penyelenggaraan dan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.00 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan REncana Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				
1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTR Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTR Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTR Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kot		1.03.11.	.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	199.99
1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IIJJK Nasional di Kabupaten/Kota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTR Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTR Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTR Kabupaten/Kot		1 03 11 2 02 Penyelenggaraan Sistem	Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 1.03.11.2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.020 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 250.00 1.03.12.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penganfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				
1.03.11.2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUK Nasional di Kabupaten/Kota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.12.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03.01 Koordinasi An Sinkronisasi Pengram Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengram Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengram Pemanfaatan Ruang			2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
IUJK Nasional di Kabupaten/Kota 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.020 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengusunan RRTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengusunan RRTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengusunan Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengusunan Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengusunan Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengusunan Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengusunan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.11.	, ,	
1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.12.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.0005 Voordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	
1.03.11.2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penganfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas. 1.03.11.	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan	
dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas 1.03.11. IUJK Na	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) .2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota	
1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasi 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) .2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota a, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Noordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Noordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasi 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota a, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan,	
1.03.12.204.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas. 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota a, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rtib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
L03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas. 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter 1.03.11.	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota a, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rtib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan,	250.00
1.03.12.PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas. 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter 1.03.11. dan Ter	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota 3. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rtib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rtib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	250.00
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas. 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter 1.03.11. dan Ter 1.03.11.	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota 3. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rtib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rtib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	250.00
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas. 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter 1.03.11. dan Ter 1.03.11.	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota 3. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rtib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rtib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	250.00
1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12 PROG	1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas. 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter 1.03.11. dan Ter 1.03.11. Kabupa	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota 3. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 3.204.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	250.00
dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12 PROG	1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas. 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter 1.03.11. dan Ter 1.03.11. Kabupa	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota 3. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 3.204.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	250.00
1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12 PROG	1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas. 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter 1.03.11. Kabupa SRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUAN 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruan	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota 3. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 3.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi aten/Kota NG ang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03.005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12 PROG	1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasi 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter 1.03.11. dan Ter 1.03.11. Kabupa GRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUAN 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruan 1.03.12.	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota a, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, ritib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, ritib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi aten/Kota NG ang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi	
1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kot 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12 PROG	1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasi 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter 1.03.11. dan Ter 1.03.11. Kabupa 3RAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUAN 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruadan Per	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota a, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, ritib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi sten/Kota NG ang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi netapan RTRW Kabupaten/Kota	
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12 PROG	1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas. 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter 1.03.11. Kabupa 3RAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUAN 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ru: 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota a, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi aten/Kota NG ang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi netapan RTRW Kabupaten/Kota Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	250.00
1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12 PROG	1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas. 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter 1.03.11. dan Ter 1.03.11. Kabupa SRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUAN 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ru. 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi 1.03.12.	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota a, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi sten/Kota NG ang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi netapan RTRW Kabupaten/Kota Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	250.00 150.00
dan Pembangunan Daerah 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12 PROG	1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas. 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter 1.03.11. dan Ter 1.03.11. Kabupa SRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUAN 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruan 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi 1.03.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota a, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi netapan RTRW Kabupaten/Kota Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	250.00 150.00
1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12 PROG	1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas. 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter 1.03.11. dan Ter 1.03.11. Kabupa GRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUAN 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruan 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi 1.03.12. 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota a, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi aten/Kota NG ang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi netapan RTRW Kabupaten/Kota Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	250.00 150.00
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12 PROG	1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas. 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter 1.03.11. dan Ter 1.03.11. Kabupa GRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUAF 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruafan Pengana	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota a, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi aten/Kota NG ang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi netapan RTRW Kabupaten/Kota Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kot	250.00 250.00 150.00 350.00
	1.03.12 PROG	1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas. 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter 1.03.11. dan Ter 1.03.11. Kabupa GRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUAF 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruafan Per 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi 1.03.12. 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi 1.03.12.2.04 Penetapan Rencana Tata Ruafan Per	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota a, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi aten/Kota NG ang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi netapan RTRW Kabupaten/Kota Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kot Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kot	250.00 150.00 350.00
	1.03.12 PROG	1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasi 1.03.11. 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter 1.03.11. dan Ter 1.03.11. Kabupa GRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUAN 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Rui 1.03.12. dan Per 1.03.12. 1.03.12.1.03.12. dan Per 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi 1.03.12. dan Per 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi 1.03.12. 1.03.12.1. 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi 1.03.12. 1.03.12.1.	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota a, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi aten/Kota NG ang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi netapan RTRW Kabupaten/Kota Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kot Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kot Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kot	250.00 150.00 350.00
	1.03.12 PROG	1.03.11. 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jas. 1.03.11. IUJK Na 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha 1.03.11. dan Ter 1.03.11. dan Ter 1.03.11. Kabupa GRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUAF 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruafan Per 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi 1.03.12. 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi 1.03.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.	a Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 2.03.01 Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan asional di Kabupaten/Kota a, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, rib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi aten/Kota NG ang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi netapan RTRW Kabupaten/Kota Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kot Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kot Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kot	250.00 150.00 350.00

	NTAN AM PENUNJANG URUSAN PE	EMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Keuangan Perangkat Daerah	
	1.05.01.2.0271411111561451	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	1.03.01.2.05 Administrasi K	epegawaian Perangkat Daerah	
		1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.414.939
		1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.240
		GEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
		IAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	AN UMUM PENATAAN KUAN AM PENGEMBANGAN PERUI	NG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02 1.0010	1	enyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupa	
		1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena	
		Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1.04.02.2.01.02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi	
		Perumahan	
		1.04.02.2.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya	
	+	yang Belum Tertangani 1.04.02.2.01.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
		1.04.02.2.01.05 Pendataan Imgkat Kerasakan Kaman Akibat Sericana 1.04.02.2.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana	
		Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1.04.02.2.01.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan	
		Rumah Khusus	
	1.04.02.2.02 Sosialisasi da	an Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Pro	
		1.04.02.2.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	
	+	kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
		1.04.02.2.02.02 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	
	+	1.04.02.2.02.03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses	
		Perumahan KPR-FLPP	
		1.04.02.2.02.04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan	
		Fasilitator	
-	1.04.02.2.03 Pembangunan	dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
		1.04.02.2.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED)	
		bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1.04.02.2.03.03 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
	+	1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
		1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	
		atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1.04.03 PROGRA	AM KAWASAN PERMUKIMA		
	1.04.03.2.01 Penerbitan Izi	n Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
		1.04.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan	
		Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	
	1.04.03.2.02 Penataan dan	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
		1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	150.000
	+	1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas	
		Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	250.000
	1.04.03.2.03 Peningkatan K	ualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
		1.04.03.2.03.03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
		1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	6.600.000
1.04.04 PROG	RAM PERUMAHAN DAN	N KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
	1.04.04.2.01 Pencegahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
		1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap	
		Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman	
		Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
	RAM PENINGKATAN PI	RASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
1.04.05 PROG		I DOLLD I	
1.04.05 PROG		elenggaraan PSU Perumahan	
1.04.05 PROG		1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
1.04.05 PROG		1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
	1.04.05.2.01 Urusan Penye	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
JRUSAN PEM	1.04.05.2.01 Urusan Penye ERINTAHAN BIDANG PE	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN	
JRUSAN PEM 01.00 DINAS	1.04.05.2.01 Urusan Penya ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
JRUSAN PEM 01.00 DINAS	1.04.05.2.01 Urusan Penye ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN ERAM PENGELOLAAN IZ	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI	
JRUSAN PEM 01.00 DINAS	1.04.05.2.01 Urusan Penye ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN ERAM PENGELOLAAN IZ	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
JRUSAN PEM 01.00 DINAS	1.04.05.2.01 Urusan Penye ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN ERAM PENGELOLAAN IZ	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI zin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penyo ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN IRAM PENGELOLAAN IZ 2.10.02.2.01 Pemberian Iz	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN JATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI zin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman	200.000
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG	ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN BRAM PENGELOLAAN IZ 2.10.02.2.01 Pemberian Iz	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI zin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	200.000
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG	ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN BRAM PENGELOLAAN IZ 2.10.02.2.01 Pemberian Iz	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI Zin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha ENGKETA TANAH GARAPAN	200.000
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penye ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN BRAM PENGELOLAAN IZ 2.10.02.2.01 Pemberian Iz BRAM PENYELESAIAN SE 2.10.04.2.01 Penyelesaian	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI zin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha INGKETA TANAH GARAPAN 1. Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penyo ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN IRAM PENGELOLAAN IZ 2.10.02.2.01 Pemberian Iz ERAM PENYELESAIAN SE 2.10.04.2.01 Penyelesaian	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI Zin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha ENGKETA TANAH GARAPAN 1 Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penyo ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN IRAM PENGELOLAAN IZ 2.10.02.2.01 Pemberian Iz ERAM PENYELESAIAN SE 2.10.04.2.01 Penyelesaian	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI Zin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha ENGKETA TANAH GARAPAN 1 Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 1 Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintal	200.000
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penyo ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN IRAM PENGELOLAAN IZ 2.10.02.2.01 Pemberian Iz ERAM PENYELESAIAN SE 2.10.04.2.01 Penyelesaian	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN JATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI in Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha ENGKETA TANAH GARAPAN 1 Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 1 Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintal 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1	200.000
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG 2.10.05 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penye ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN BRAM PENGELOLAAN IZ 2.10.02.2.01 Pemberian Iz 2.10.04.2.01 Penyelesaiar IRAM PENYELESAIAN GA 2.10.05.2.01 Penyelesaiar	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI Zin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha INGKETA TANAH GARAPAN 1 Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 1 Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintal (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG 2.10.05 PROG	ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN BRAM PENGELOLAAN IZ 2.10.02.2.01 Pemberian Iz 2.10.04.2.01 Penyelesaian BRAM PENYELESAIAN SE 2.10.04.2.01 Penyelesaian BRAM PENYELESAIAN GJ 2.10.05.2.01 Penyelesaian	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI Zin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha ENGKETA TANAH GARAPAN 1. Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 1. Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintal 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG 2.10.05 PROG	ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN BRAM PENGELOLAAN IZ 2.10.02.2.01 Pemberian Iz 2.10.04.2.01 Penyelesaian BRAM PENYELESAIAN SE 2.10.04.2.01 Penyelesaian BRAM PENYELESAIAN GJ 2.10.05.2.01 Penyelesaian	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI Zin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha ENGKETA TANAH GARAPAN 10 Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 10 Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintal 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DA Lubjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimu	200.000
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG 2.10.05 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penyelesaiar ERINTAHAN BIDANG PEPEKERJAAN UMUM PEN RAM PENGELOLAAN IZ 2.10.02.2.01 Pemberian Iz 2.10.04.2.01 Penyelesaiar ERAM PENYELESAIAN G 2.10.05.2.01 Penyelesaiar ERAM PENYELESAIAN G 2.10.06.2.01 Penyelesaiar	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN JATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI zin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha RIGKETA TANAH GARAPAN 1 Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 1 Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintal 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DA ubjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimu 2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	200.000
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG 2.10.05 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penye ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN RAM PENGELOLAAN IZ 2.10.02.2.01 Pemberian Iz 2.10.04.2.01 Penyelesaiar 2.10.04.2.01 Penyelesaiar 2.10.05.2.01 Penyelesaiar 2.10.06.2.01 Penyelesaiar 2.10.06.2.01 Penetapan S	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI IZIN LOKASI Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha INGKETA TANAH GARAPAN IN Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN IN Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintal 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DA ubjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimu 2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah isanti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah	200.000
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG 2.10.05 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penye ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN RAM PENGELOLAAN IZ 2.10.02.2.01 Pemberian Iz 2.10.04.2.01 Penyelesaiar 2.10.04.2.01 Penyelesaiar 2.10.05.2.01 Penyelesaiar 2.10.06.2.01 Penyelesaiar 2.10.06.2.01 Penetapan S	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI Zin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha INGKETA TANAH GARAPAN 1 Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 1 Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintal 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DA ubjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimu 2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah ianti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Alabentee Lintas Daerah I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG 2.10.05 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penye ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN RAM PENGELOLAAN IZ 2.10.02.2.01 Pemberian Iz 2.10.04.2.01 Penyelesaiar 2.10.04.2.01 Penyelesaiar 2.10.05.2.01 Penyelesaiar 2.10.06.2.01 Penyelesaiar 2.10.06.2.01 Penetapan S	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI IZIN LOKASI Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha INGKETA TANAH GARAPAN IN Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN IN Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintal 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DA ubjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimu 2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah isanti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah	200.000
URUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG 2.10.05 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penyelesian Penyelesian Penyelesian Iz 2.10.02.2.01 Pemberian Iz 2.10.04.2.01 Penyelesian Peny	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha INGKETA TANAH GARAPAN 10 Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 10 Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintal 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DA ubjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimu 2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah ianti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.02.02 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG 2.10.05 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penye ERINTAHAN BIDANG PE PEKERJAAN UMUM PEN RAM PENGELOLAAN IZ 2.10.02.2.01 Pemberian Iz 2.10.04.2.01 Penyelesaiar 2.10.04.2.01 Penyelesaiar 2.10.05.2.01 Penyelesaiar 2.10.06.2.01 Penyelesaiar 2.10.06.2.01 Penetapan S	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha INGKETA TANAH GARAPAN 10 Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 10 Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintal 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DA ubjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimu 2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah ianti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.02.02 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG 2.10.05 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penyelesian Penyelesian Penyelesian Iz 2.10.02.2.01 Pemberian Iz 2.10.04.2.01 Penyelesian Peny	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN JATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI Zin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha ENGKETA TANAH GARAPAN 10. Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 10. Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintal 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DA ubjek dan Objek Redistribusi Tanah Kelebihan Maksimu 2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah ianti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah ianti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.02.02 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG 2.10.05 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penyelesian Penyelesia	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN JATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI Zin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha ENGKETA TANAH GARAPAN 10. Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 10. Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintal 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DA ubjek dan Objek Redistribusi Tanah Kelebihan Maksimu 2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah ianti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah ianti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.02.02 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
URUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG 2.10.05 PROG 2.10.06 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penyelesian Penyelesia	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian IRTANAHAN IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI Zin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha INGKETA TANAH GARAPAN 1. Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 1. Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintal 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DA ubjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimu 2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.02 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.02 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.02.02 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.02.02 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.02.02 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000
URUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG 2.10.05 PROG 2.10.06 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penyelesian Persentahan Bidang Pepersenaan umum Penyeran Iz 2.10.02.2.01 Pemberian Iz 2.10.04.2.01 Penyelesaian Pen	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian IRTANAHAN IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI Zin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha INGKETA TANAH GARAPAN 1. Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 1. Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintal 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DA ubjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimu 2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.02 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.02 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.02.02 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.02.02 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.02.02 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG 2.10.05 PROG 2.10.06 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penyelesian Persentahan Bidang Pepersenaan umum Penyeran Iz 2.10.02.2.01 Pemberian Iz 2.10.04.2.01 Penyelesaian Pen	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian IATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha ISINGKETA TANAH GARAPAN 10 Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 10 Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintal 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DA ubjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimu 2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah ianti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.02.02 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NANAH KOSONG ZIN.09.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah TANAH	
JRUSAN PEM 01.00 DINAS 2.10.02 PROG 2.10.04 PROG 2.10.05 PROG 2.10.06 PROG	1.04.05.2.01 Urusan Penyelesian Persentahan Bidang Pepersenaan umum Penyeran Iz 2.10.02.2.01 Pemberian Iz 2.10.04.2.01 Penyelesaian Pen	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ERTANAHAN JATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN IN LOKASI Zin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha ENGKETA TANAH GARAPAN 10. Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 10. Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintal 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota NAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DA ubjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimu 2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah ianti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.06.2.02.02 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ANAH KOSONG ZIN Membuka Tanah 2.10.09.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah TANAH Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	150.000

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Berdasarkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi tahun berjalan, terdapat beberapa kebijakan yang terakait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman seperti yang ditunjukan pada tabel berikut ini:

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)			
A	Nasional		
	permukiman dalam rang	an	
	2. Program-program pembangun infrastruktur untuk menguran kesenjangan antarwilayah,dukung terhadap kawasan perbatasan d kawasan terpencil serta terisolir	gi	
	3. Program-program pembangun infrastruktur PU dan permukiman ya berbasiskan pemberdayaan masyaraka	ng	
	4. Penerapan prinsip-prinsip gre construction dalam pelaksanaan selur pembangunan infrastruktur PU d permukiman	uh	
	5. mendorong pembangunan secara umu dan khususnya pembangun		

	infrastruktur PU dan permukiman yang	
	berbasiskan penataan ruang	
	1	
6.	pembangunan infrastruktur PU dan	
	permukiman dalam rangka adaptasi	
	terhadap perubahan iklim	
7.	Pembangunan infrastruktur sesuai	
/-		
	dengan arahan Rencana Tata Ruang	
	Wilayah dan pembangunan	
	berkelanjutan di kawasan strategis,	
	tertinggal, perbatasan, daerah terisolir	
	untuk mengurangi kesenjangan wilayah,	
	daerah rawan bencana, serta	
	meningkatkan kualitas lingkungan	
	perumahan dan permukiman dan	
	cakupan pelayanan dasar bidang	
	pekerjaan umum dan permukiman untuk	
	mewujudkan kesejahteraan rakyat yang	
	berkeadilan dan inklusif	
8.	Pembangunan infrastruktur sesuai	
0.	č	
	dengan arahan Rencana Tata Ruang	
	Wilayah dan pembangunan	
	berkelanjutan melalui peningkatan	
	keandalan sistem di kawasan pusat	
	produksi dan ketahanan pangan guna	
	mendukung daya saing dan mendorong	
	industri konstruksi untuk mewujudkan	
	pembangunan ekonomi yang berkualitas	
9.	Pembinaan penyelenggaraan	
	infrastruktur melalui optimasi peran	
	pelayanan publik bidang pekerjaan	
	umum dan permukiman untuk	
	Permaninan untuk	

	mendukung otonomi daerah dan	
	penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata	
	kelola pemerintahan, serta mendukung	
	reformasi birokrasi dan mewujudkan	
	good governance	
2.	Provinsi	
	1. Mengembangkan rencana terpadu	
	pengembangan wilayah dan	
	pengembangan pemukiman	
	2. Menata Kawasan Pusat Pemerintahan	
	Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	
	di Daerah Pasir Peti dan Tersedianya	
	Prasarana Pendukung Pusat	
	Pemerintahan Desa-Desa	
	3. Pengelolaan sumber daya air	
	dilaksanakan dengan memperhatikan	
	keserasian antara konservasi dan	
	pendayagunaan, antara pemanfaatan air	
	permukaan dan air tanah, antara	
	pengelolaan demand dan pengelolaan	
	supply, serta antara pemenuhan	
	kepentingan jangka pendek dan	
	kepentingan jangka panjang.	
	4. Konservasi akan lebih diutamakan	
	sehingga akan terjadi keseimbangan	
	antara upaya untuk memenuhi kebutuhan	
	jangka pendek dan upaya untuk	
	memenuhi kebutuhan jangka panjang.	
	5. Mengharmonisasikan keterpaduan	
	sistem jaringan jalan dan jembatan	

	dengan kebijakan tata ruang wilayah dan	
	meningkatkan keterpaduannya dengan	
	sistem jaringan prasarana lainnya yang	
	menjamin efisiensi pelayanan	
	transportasi	
6.	Meningkatkan koordinasi antara	
	pemerintah pusat dan pemerintah	
	provinsi dalam pembangunan prasarana	
	jalan dan jembatan	
7.		
	jaringan prasarana jalan dan jembatan	
	berbasis pulau (Siantan, Palmatak,	
	Jemaja, Siantan Tengah dan Siantan	
	Timur)	
8.	Meningkatkan kinerja pengelola air	
	minum (PDAM), yaitu melalui	
	peningkatan manajemen serta penurunan	
	tingkat kebocoran/kehilangan air pada	
	ambang batas normal (20%).	
9.	Mendorong pengelolaan PDAM agar	
	lebih profesional dan menerapkan	
	prinsip-prinsip Good Corporate	
	Governance serta meningkatkan kualitas	
	sumber daya manusia pengelola	
	pelayanan air minum	
$1\overline{0}$. Meningkatkan peranserta seluruh	
	pemangku kepentingan dalam upaya	
	mencapai sasaran pembangunan air	
	minum	

11.	. Meningkatkan cakupan dan kualitas
	pelayanan air limbah
12.	. Meningkatkan partisipasi masyarakat
	dalam pembangunan dan pengelolaan air
	limbah.
12	Managahan balan balan dalam
13	. Mengembangkan kelembagaan dalam
	penanganan air limbah
14.	. Menciptakan kesadaran seluruh
	stakeholders terhadap pentingnya
	peningkatan pelayanan persampahan dan
	drainase
1.5	Marinaladhan
15	. Meningkatkan peran serta seluruh
	stakeholders dalam upaya mencapai
	sasaran pembangunan persampahan dan
	drainase
16	. Meningkatkan kinerja pengelola
	persampahan dan drainase
17.	. Meningkatkan kualitas sumber daya
	manusia pengelola persampahan dan
	drainase
10	Maninghathan nambinaan dalam
18.	. Meningkatkan pembinaan dalam
	pengendalian pembangunan bangunan
	gedung
19	. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja
	konstruksi yang profesional
20	. Meningkatkan dukungan terhadap
	terciptanya iklim usaha yang kondusif
	Crespunya ikinii usana yang kondusii

21. Meningkatkan pembinaan usaha	
konstruksi yang kompetitif dan	
professional	
processional	
22. Meningkatkan pembinaan konstruksi	
secara transparan dan terbuka dengan	
melibatkan masyarakat	
23. Menegakkan tertib administrasi dalam	
penyelenggaraan pembangunan	
infrastruktur melalui pengawasan dengan	
berdasarkan pada peraturan	
perundangan-undangan yang berlaku	
serta penerapan Good Governance	
24. Melaksanakan pengawasan sebagai	
Quality Assurer dan konsultan	
25. Menggunakan sumberdaya yang ada	
melaksanakan pengawasan terhadap	
seluruh penyelenggaraan pembangunan	
infrastruktur bidang PU dan Permukiman	
26. Menerapkan cara pemeriksaan yang	
komprehensif dan memenuhi standar	
pemeriksaan yang ditetapkan	
pemeriksaan yang ditetapkan	
27. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam	
pengawasan pembangunan infrastruktur	
PU dan permukiman	

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Renja OPD

Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD, maka perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dinyatakan pada tabel sebagai berikut:

No	Tujuan	No	Sasaran
1	Meningkatkan kinerja	1	Meningkatkan cakupan layanan pendukung
	pengelolaan Sumber Daya Air		dalam perencanaan, pelaksanaan,
			monitoring, dan evaluasi pengelolaan SDA
		2	Tersedianya sarana/prasarana air baku
			untuk air minum yang layak untuk
			masyrakat
		3	Terlindunginya kawasan sumber air baku
		4	Terlindung dari bahaya banjir melalui
			pembangunan sarana/prasarana
			pengendalian banjir
		5	Terlindungnya Panjang garis pantai dan
			pemukiman di daerah pesisir dari bahaya
			abrasi dan gelombang melalui
			pembangunan sarana/prasarana
			pengamanan pantai
2	Terbangun daya dukung dan	1	Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan
	kualitas jalan dan jembatan yang		di Kabupaten Kepulauan Anambas
	baik	2	Meningkatkan panjang struktur/pelebaran
			jalan dan jembatan di Kabupaten
			Kepulauan Anambas
		3	Meningkatkan panjang jalan dan jembatan
			baru yang dibangun di Kabupaten
			Kepulauan Anambas
3	Meningkatkan pengelolaan dan	1	Tertatanya kawasan kumuh di Ibukota
	pengembangan kawasan		Kecamatan
	permukiman	2	Meningkatkan cakupan pelayanan air
			minum
		3	Terbinanya PDAM

		4	Meningkatkan pengelolaan persampahan
		5	Meningkatkan pelayanan sanitasi
		6	Meningkatkan infrastruktur permukiman
			perdesaan/kumuh/nelayan
		7	Meningkatkan Kawasan-Kawasan Pusat
			Pertumbuhan
4	Meningkatkan penataan kawasan	1	Terbangunnya Sarana dan Prasarana
	Pusat Pemerintahan Daerah dan		Pendukung Pusat Pemerintah Daerah dan
	Desa di Kabupaten Kepulauan		Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas
	Anambas		
5	Meningkatkan sarana dan	1	Tersedianya sarana dan prasarana
	prasarana komunikasi dan		komunikasi dan informasi yang memadai di
	informasi yang memadai di Dinas		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
	Pekerjaan Umum		dan Perumahan Rakyat dan Kawasan
			Permukiman
6	Meningkatkan kualitas	1	Menurunkan temuan administratif dalam
	pengawasan dan pembinaan		pembangunan infrastruktur pada Dinas
	Suber Daya Aparatur Dinas		Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
	Pekerjaan Umum		Perumahan Rakyat dan Kawasan
			Permukiman
		2	Menurunkan tingkat kebocoran dalam
			pembangunan infrastruktur pada Dinas
			Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
			Perumahan Rakyat dan Kawasan
			Permukiman
7	Meningkatkan Kualitas	1	Meningkatkan pertumbuhan dan
	Pembinaan Kontruksi		perkembangan konstruksi untuk
			mewujudkan struktur usaha konstruksi
			yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi
		2	Meningkatkan kompetensi SDM konstruksi
			sesuai standar kompetensi kerja nasional

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada Visi misi Kabupaten Kepulauan Anambas, Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lebih menitikberatkan pada hal :Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan menumbuhkan kegiatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan terpadu, yaitu:

- 1.1. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- 1.2. Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
- 1.3. Penyediaan dan pengelolaan air baku.
- 1.4. Pembangunan infrastruktur pedesaan.
- 1.5. Pengembangan kinerja pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan air lainnya
- 1.6. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.

Selain itu rumusan program dan kegiatan mempertimbangkan juga faktor:

- Insfrastruktur Pekerjaan Umum
- Infrastruktur Pemukiman
- Kapasitas Sumberdaya Manusia
- Pencapaian MDGS
- Pengentasan Kemiskinan
- Pencapaian SPM
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
- Pengembangan daerah terisolir

Dimana Faktor tersebut dapat dicapai melalui:

- 1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan menumbuhkan kegiatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan terpadu;
- 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi lebih sehat dan berpendidikan;
- 3. Meningkatkan mutu Sumber daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas agar memiliki kemampuan yang diakui, terampil dan berakhlak mulia;
- 4. Menciptakan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal serta mengedepankan partisipasi masyarakat demi terwujudnya pemerintah yang bersih.

Rumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan isu-isu penting sebagaimana tercantum pada Sub Bab 2.3J umlah keseluruhan program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2022 berjumlah 13 program dengan jumlah seluruh kegiatan mencapai 25 kegiatan. Sebaran lokasi dari jumlah program dan kegiatan yang direncanakan, paling banyak terdapat di Kecamatan Siantan, hal tersebut dikarena Kecamatan sebagai pusat kota sekaligus sebagai ibukota Kabupaten sekaligus pusat pemeritahan yang memerlukan perhatian khusus untuk menggiatkan pembangunan dan penataan/pembenahan kota itu sendiri guna untuk meningkatkan citra Anambas sebagai kota yang memiliki tata ruang yang bersih.

Terdapat 20 program yang tersebar hampir diseluruh lokasi Kecamatan/Desa yang terdiri dari :

No	Program	Kegiatan
1	Program Administrasi	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Kepegawaian Perangkat Daerah	2.
		3.
		4.
2	Program Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Perangkat Daerah	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.
3	Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	 Pengadaan Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5		

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	 Penyediaaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasioanl Dinas atau Lapangan
6	Program Pengolahan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
7	Pengelolahan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Pedesaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Pedesaan
8	Program pengembangan Sistem dan Pengelolahan Persampahan di daerah Kabupaten/ Kota	 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistim Pengolahan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/ Kota Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
9	Program Pengolahan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	 Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah terpusat Skala Pemukiman Pembangunan atau Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
10	Program Pengolahan dan Pengembangan sistem Drainase yang Terhubung Langsung Dengan sungai Dalam daerah Kabupaten/ Kota	 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
11	Program Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di Kawasan	 Pembangunan dan Pengembagan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kawasan Starategis Daerah Kabupaten/ Kota

	Stategi di Daerah Kabupaten/ Kota	
12	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/ Kota	1. Penataan Bangunan dan Lingkungan
13	Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	 Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jalan Rehabilitasi Jalan Pemabangunan Jembatan
14	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan TertibPemamfaatan Jasa Konstruksi	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemamfaatan Jasa Konstruksi
15	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan TertibPemamfaatan Jasa Konstruksi	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemamfaatan Jasa Konstruksi
16	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemamfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemamfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
19	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

20	Penggunaan Tanah Yang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksaan Konsolidasi
	Hamparannya dalam Satu	Tanah Kabupaten/ Kota
	Daerah Kabupaten/ Kota	
	_	

Dengan Jumlah Rancangan Awal Renja PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan Total Perkiraan Anggaran yang dibutuhkan dari APBD 2025 sebesar Rp. 388.202.206.071 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Awal (Renja) PD Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun anggaran 2025 merupakan acuan dalam pelaksanaan aktivitas operasional organisasi. Karena, semua pihak mulai dari unsur pimpinan dan staf bertanggung jawab atas pelaksanaan program yang telah ditetapkan dan pencapaian berbagai target yang telah disepakati.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas bertanggung jawab untuk menjaga konsisten antara program yang tercantum didalam Renja ini dengan program yang tercantum dalam arah dan kebijakan umum maupun strategi dan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya dapat tercapai.

Dokumen Rancangan Awal Renja PD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 berkedudukan dan berfungsi sebagai rujukan penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolak ukur yaitu: masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (Outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Oleh karenanya Rancangan Awal Renja PD ini merupakan hasil kesepakatan antara pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas dengan stafnya.

Rancangan Akrih Renja PD ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Tarempa, 02 Februari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN,

SYARIF AHMAD, SE

19770720 201001 1 016